



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : M. ABD. ROHIM
2. Jabatan : HAKIM TINGGI
3. NHK : 9926

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.285.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/80 m2 di MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 310.000.000
2. Tanah Seluas 389 m2 di MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 675 m2/64 m2 di BOJONEGORO, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
4. Tanah Seluas 248 m2 di MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
5. Tanah Seluas 174 m2 di BOJONEGORO, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
6. Tanah Seluas 2000 m2 di BOJONEGORO, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
7. Tanah Seluas 300 m2 di BOJONEGORO, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 288.500.000

1. MOTOR, VESPA SPRINT Tahun 1977, HASIL SENDIRI Rp. 500.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
4. MOBIL, TOYOTA INNOVA KIJANG Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	37.700.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	484.559.456
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.095.759.456
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.095.759.456

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.